

WARTA PEMERIKSA



Mendorong Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

IHPS I TAHUN 2023
MEMUAT RINGKASAN
DARI 705 LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN
(LHP).



10

IHPS I 2023
Dorong Perbaikan
Tata Kelola
Keuangan Negara

22

BPK Paparkan
Arti Penting
Keterlibatan
Indonesia di IMO

35

SIAP Connect
Permudah
Proses
Pemeriksaan



PENGARAH

Isma Yatun
Hendra Susanto
Nyoman Adhi Suryadnyana
Daniel Lumban Tobing
Haerul Saleh
Ahmadi Noor Supit
Pius Lustrilanang
Slamet Edy Purnomo

PENANGGUNG JAWAB

Bahtiar Arif

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Fitri Yuliantri Permana
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya daripihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Hasil tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi isu utama dari *Warta Pemeriksa* edisi November 2023. Pentingnya isu ini tergambar pada saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka *good governance*. "Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut," ujar Isma dalam penyampaian IHPS I tahun 2023 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

IHPS I tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 681 LHP keuangan, 2 LHP kinerja, dan 22 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). LHP tersebut mengungkap 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun. Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar.

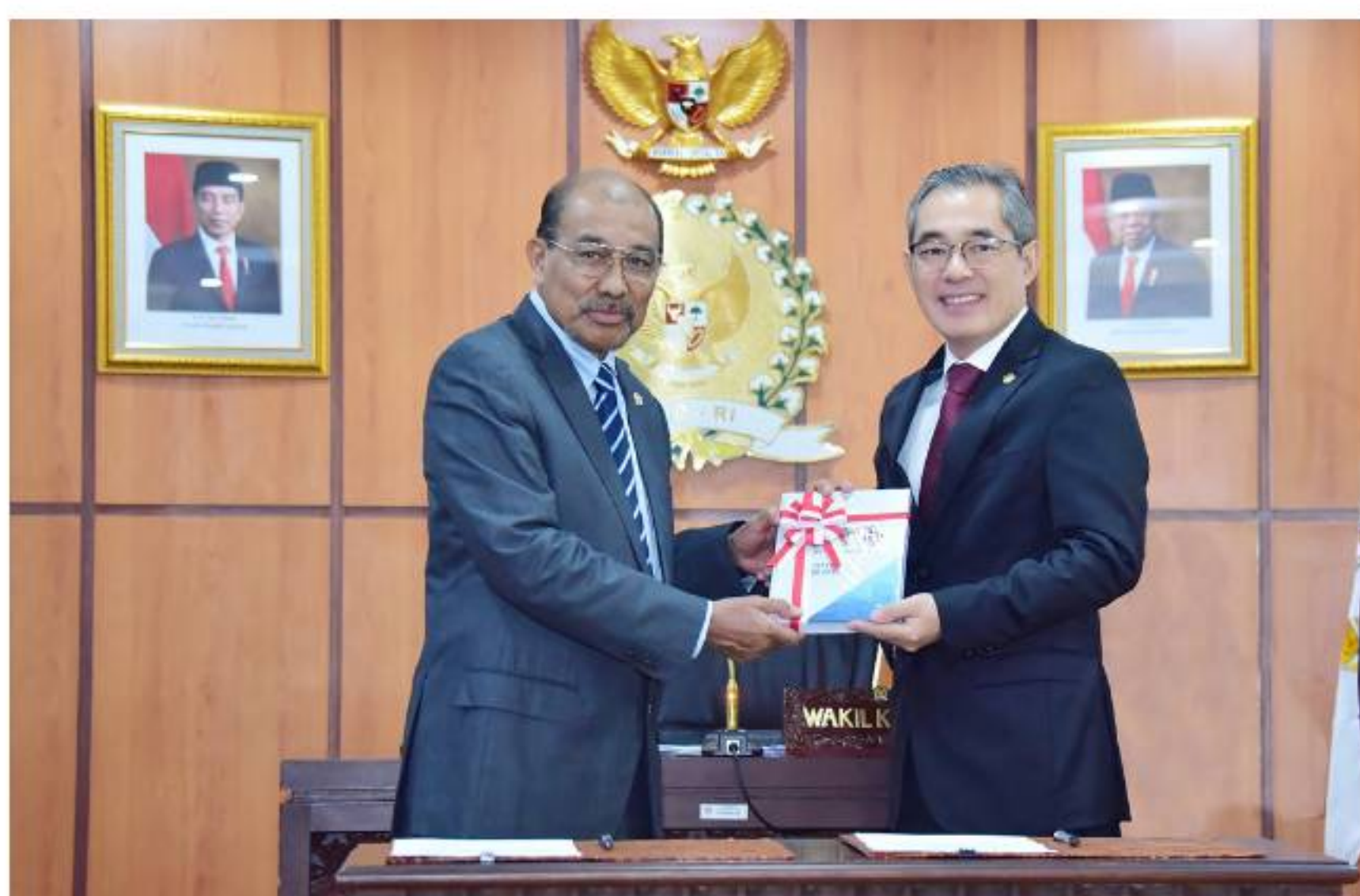
Laporan lain yang redaksi siapkan, yaitu BPK dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI) periode 2024-2029. Sebelumnya, BPK telah menjalankan perannya sebagai sekretariat ASEANSAI sejak pembentukan ASEANSAI pada 2011.

Sebagai sekretariat ASEANSAI, BPK berperan sebagai penggerak untuk memastikan kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik. Selain itu, sekretariat ASEANSAI juga bertanggung jawab mengelola kesekretariatan dan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan ASEANSAI. Termasuk berperan dalam pengembangan kerja sama ASEANSAI dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selamat menikmati. ~



4 >> Mendorong Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

IHPS I Tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP).



7 >> Apresiasi untuk Pemda yang Menyelesaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan opini BPK dibanding tahun sebelumnya.

10 >> IHPS I 2023 Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9.261 temuan yang memuat 15.689 permasalahan sebesar Rp18,19 triliun.



- 14 >> BPK Sampaikan 25 Pemeriksaan Investigatif dengan Indikasi Kerugian Rp31,55 Triliun
- 16 >> Mencegah Kecurangan pada Laporan Keuangan
- 20 >> BPK Bertekad Kembali Menjadi Auditor Eksternal IMO
- 22 >> BPK Paparkan Arti Penting Keterlibatan Indonesia di IMO
- 24 >> BPK Dipercaya Sebagai Sekretariat ASEANSI Periode 2024-2029
- 26 >> Ketua BPK dan Dubes Australia Sepakat Soal Kesempatan untuk Perempuan
- 27 >> BPK Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman dengan SAI Arab Saudi
- 30 >> Berpikir dan Memandang *Out of The Box* Lewat Buku *Bagai Novel*
- 33 >> *I-MESSAGE*, Model Komunikasi Setara ala Virginia Satir
- 35 >> SIAP Connect Permudah Proses Pemeriksaan
- 37 >> BPK Harapkan Komunikasi dengan PT Pindad Dapat Berjalan Efektif
- 38 >> Anggota V BPK: Jangan Hanya Fokus Terhadap Angka, tapi Juga Dampak Nyata untuk Masyarakat
- 40 >> BPK Perwakilan Diminta Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat Lokal
- 42 >> Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Implementasi Renstra BPK 2020-2024
- 45 >> Pelaporan Kinerja Untuk Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara
- 52 >> Berita Foto



■ Penyampaian IHPS I Tahun 2023 oleh Ketua BPK, Isma Yatun kepada pimpinan DPR di Jakarta.

Mendorong Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

IHPS I TAHUN 2023 MEMUAT RINGKASAN DARI 705 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden. IHPS I Tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 681 LHP Keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

LHP tersebut mengungkap 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun. Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar.

Dalam penyampaian IHPS I 2023 kepada DPR, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, sinergi antara BPK dan lembaga legislatif tersebut sangat penting untuk mendukung tindak lanjut pemeriksaan. Isma menyampaikan, optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka *good governance*.

"Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut," ujar Isma dalam penyampaian IHPS I Tahun 2023 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

IHPS I Tahun 2023 memuat 134 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 pada pemerintah pusat, di antaranya adalah 81 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dengan 80 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 1 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan opini WTP. Selain itu juga memuat 40 laporan keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan opini 33 WTP, 6 WDP, dan 1 Tidak Wajar (TW). BPK juga telah memeriksa 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, serta empat laporan keuangan badan lainnya tahun 2022, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji.

IHPS ini juga memuat dua hasil pemeriksaan kinerja dengan tema prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja tersebut antara lain pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi TA 2020 sampai semester I 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).



Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Pemerintah telah melakukan penyusunan *road map* menuju *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 dan mengamankan pasokan batu bara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri. Namun, masih terdapat permasalahan antara lain, belum dilakukan sepenuhnya mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju NZE pada tahun 2060 dan rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berpotensi terjadinya kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional.

Pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di antaranya atas pendapatan, biaya, dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya. Permasalahan signifikan antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan yang memadai. Selain itu, tarif layanan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium belum sepenuhnya diterapkan oleh PT PLN.

Di hadapan para pimpinan DPR, Isma juga menyampaikan capaian kapasitas kelembagaan BPK, terutama di kancah Internasional. Selain memimpin Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2022-2023 November lalu, BPK juga masih dipercaya sebagai pemeriksa eksternal atas beberapa lembaga internasional.

Di antaranya pada Inter-Parliamentary Union untuk periode 2023 hingga 2025, World Intellectual Property Organization (atau WIPO) periode 2024 hingga 2029, serta *external auditor* untuk International Maritime Organization (IMO), termasuk World Maritime University dan International Maritime Law Institute periode 2024 hingga 2027.



■ Ketua BPK, Isma Yatun berbincang dengan Presiden Joko Widodo setelah penyampaian IHPS I Tahun 2023.

Selain itu, BPK juga terpilih sebagai tuan rumah International Congress of Supreme Audit Institutions (atau INCOSAI) ke-26 pada Tahun 2028 dan menjadi Ketua Organisasi BPK se-dunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028 hingga 2031 serta menjadi sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (atau ASEANSAI) periode 2024 hingga 2029.

"Torehan prestasi tersebut merupakan perwujudan atas dedikasi dan sinergi dengan para *stakeholders* BPK, terutama DPR RI," ungkapnya.

Sementara, dalam penyampaian IHPS I Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (8/12/2023), Isma menyampaikan pihaknya turut mengawal program pembangunan pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

IHPS I Tahun 2023 selain mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya, juga memuat pemeriksaan atas empat tema prioritas nasional, yaitu penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, termasuk terkait SDGs.

IHPS I Tahun 2023 mengungkapkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2005 sampai dengan semester I 2023, menunjukkan sebanyak 76,9 persen telah sesuai rekomendasi BPK. Untuk periode RPJMN 2020 hingga semester I 2023 tindak lanjut yang telah sesuai baru mencapai 47,0 persen. Dari tindak lanjut rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-semester I 2023, sebesar Rp19,20 triliun.

"Kami mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam mendorong jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Lainnya agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK," ungkap Isma. ~

Kami mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam mendorong jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Lainnya agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Apresiasi untuk Pemda yang Menyelesaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TAHUN 2022 MENUNJUKKAN ADANYA PENURUNAN OPINI BPK DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA.

Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi upaya dan kerja keras pemerintah daerah karena seluruh pemda dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, atau pada tahun 2018 hingga 2022, opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara keseluruhan mengalami perbaikan.

“Upaya yang telah dilakukan oleh pemda antara lain melakukan identifikasi, verifikasi, mengesahkan bukti-bukti pengeluaran, serta melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan dan penyetoran ke kas daerah atas pengeluaran yang belum disahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan belum tercatat dalam laporan keuangan. Pemda juga melakukan inventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, dikuasai pihak lain, dan dicatat secara gabungan, serta melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta gedung dan bangunan, dengan menyetor ke kas daerah,” ungkap Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto pada penyampaian IHPS I Tahun 2023 kepada pimpinan DPD.



■ Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto



Dorongan dari pimpinan dan anggota DPD kepada para kepala daerah adalah hal krusial untuk meningkatkan komitmen pimpinan entitas dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai upaya bersama memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.



■ Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto menyampaikan IHPS I Tahun 2023 kepada pimpinan DPD.

Terhadap 542 LKPD Tahun 2022 yang diperiksa, BPK memberikan 496 opini Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP (91 persen dari jumlah keseluruhan pemerintah daerah). Sementara itu, terdapat 41 pemerintah daerah yang mendapatkan opini WDP dan 5 pemerintah daerah yang mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, atau pada tahun 2018 hingga 2022, opini LKPD secara keseluruhan mengalami perbaikan.

Namun, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan opini BPK dibanding tahun sebelumnya yaitu, dari WTP, menjadi WDP pada 2 Pemprov, 12 Pemkab dan 4 Pemkot, serta dari WTP menjadi TMP pada 1 Pemkab. Capaian opini WTP LK Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Tahun 2022 telah melampaui target RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 93 persen dan 82 persen, sedangkan capaian opini WTP pada LK Pemerintah Kota masih di bawah target sebesar 93 persen.

Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2022 sehingga belum memperoleh opini WTP, antara lain ketekoran kas di

Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah; Aset tetap tidak dicatat dan/atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya; Realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban; dan kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, serta proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mematuhi ketentuan, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.

Sejak tahun 2005 hingga Semester I 2023, BPK telah menyampaikan 697.383 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa. Khusus untuk pemerintah daerah dan BUMD, rekomendasi yang diberikan sebanyak 566.815 rekomendasi atau 81% dari total rekomendasi.

“Dorongan dari pimpinan dan anggota DPD kepada para kepala daerah adalah hal krusial untuk meningkatkan komitmen pimpinan entitas dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai upaya bersama memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah,” ungkap Hendra. ~



@bpkrioofficial



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@humasbpkri.official



08111907010



@bpk.ri



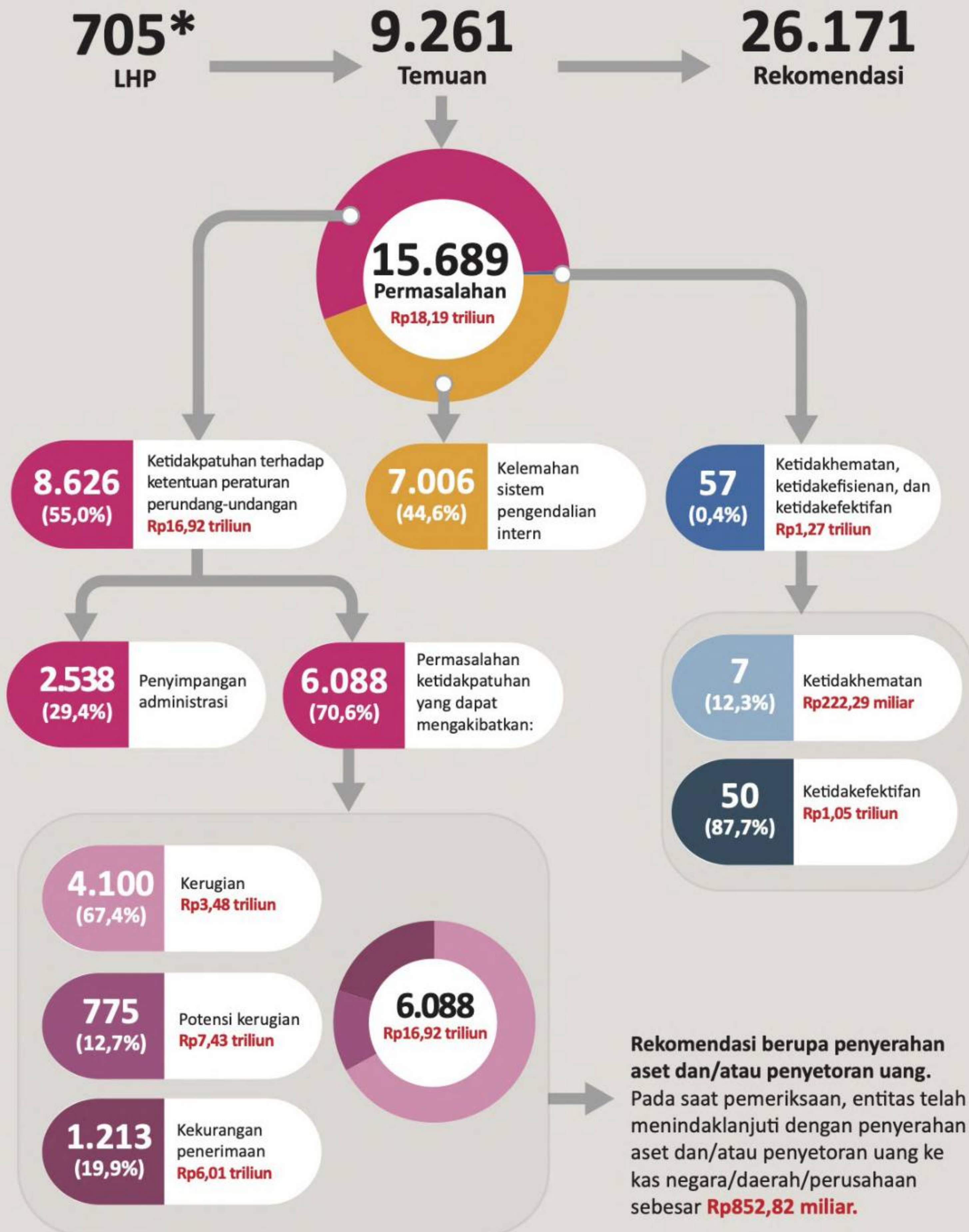
▶ BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.





”

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2023



*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

FRAUD

